

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup di dalam kajian penelitian ini. dalam bab penutup ini akan dipaparkan kesimpulan hasil dari penelitian mengenai *Networking* dalam Kebijakan Optimalisasi Terminal Terpadu Pulo Gebang serta rekomendasi bagi permasalahan yang dihadapi di dalamnya. Terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara, observasi, dan kajian data-data dalam penelitian tentang *Networking* dalam Kebijakan Optimalisasi Terminal Terpadu Pulo Gebang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menjadikan Dewan Transportasi Kota Jakarta sebagai rekan berdiskusi utama dalam merencanakan sebuah kebijakan. Tetapi Dewan Transportasi Kota Jakarta yang dimaksudkan sebagai miniatur elemen masyarakat tersebut dirasakan oleh berbagai *stakeholder* tidak cukup merepresentasikan pemikiran banyak pihak. Keanggotaan di dalam Dewan Transportasi DKI Jakarta bersifat individual tidak mewakili suatu organisasi. Sehingga usaha Pemerintah dalam melibatkan *stakeholder* yang terdampak secara langsung dianggap kurang pro-aktif.

2. Aktor swasta dalam *network* Terminal Terpadu Pulo Gebang lebih banyak memainkan peranan dalam kegiatan operasional Terminal. Keikutsertaan *stakeholder* dalam kegiatan perencanaan tergolong sangat rendah. Dampak dari hal tersebut menimbulkan pandangan bahwa Pemerintah menekan peran maupun kewenangan *stakeholder* dalam melakukan tugasnya dalam *network* sehingga terkesan aktor swasta hanya berperan sebagai objek kebijakan yang hanya melaksanakan sebuah kebijakan, bukan sebagai subjek yang seharusnya turut merancang kebijakan tersebut.
3. Banyaknya permasalahan yang dialami oleh Terminal Terpadu Pulo Gebang mengharuskan setiap *stakeholder* bekerjasama untuk mencari solusinya. Hampir setiap permasalahan yang terjadi dalam usaha mewujudkan Terminal Terpadu Pulo Gebang yang optimal saling berhubungan satu sama lain. Setiap permasalahan satu *stakeholder* dapat menjadi sumber permasalahan bagi *stakeholder* lain pula. Hal tersebut terjadi karena terdapatnya karakteristik dalam sebuah *network* yaitu *interdependence* atau ketergantungan antar aktor.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi sebagai langkah-langkah yang mungkin akan diambil oleh para *stakeholder* untuk memaksimalkan *Networking* dalam Kebijakan Optimalisasi Terminal Terpadu Pulo Gebang. Rekomendasi yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelibatan dari *stakeholder* aktor swasta secara langsung dan intens oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah tidak harus terfokus kepada Dewan Transportasi Kota Jakarta untuk bersama merencanakan suatu kebijakan. Karena pada dasarnya aktor yang terlibat secara langsung juga terkena dampak kebijakan secara langsung pula.
2. Peranan aktor swasta perlu dinaikan ke tingkat yang lebih tinggi. *Stakeholder* tersebut harus memiliki keterlibatan secara langsung yang lebih intens terkait perencanaan yang berhubungan dengan optimalisasi Terminal Terpadu Pulo Gebang.
3. Perlu adanya kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang mendasar oleh setiap *stakeholder* di dalam *network* optimalisasi Terminal Terpadu Pulo Gebang agar permasalahan tersebut tidak menjadi sumber permasalahan baru yang harus dihadapi oleh *stakeholder* lain di kemudian hari.